



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Akreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Implementasi Diplomasi Multi-Jalur oleh Pemerintah Australia  
dan *UN Women* dalam Merespons Isu Kekerasan terhadap  
Perempuan di Negara-negara Pasifik**

Skripsi

Oleh

Sherly Megaputri

2014330192

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Akreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**Implementasi Diplomasi Multi-Jalur oleh Pemerintah Australia  
dan *UN Women* dalam Merespons Isu Kekerasan terhadap  
Perempuan di Negara-negara Pasifik**

Skripsi

Oleh

Sherly Megaputri

2014330192

Pembimbing

Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi, Ph.D.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Sherly Megaputri  
Nomor Pokok : 2014330192  
Judul : Implementasi Diplomasi Multi-Jalur oleh Pemerintah Australia dan *UN Women* dalam Merespons Isu Kekerasan terhadap Perempuan di Negara-negara Pasifik

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 7 Juni 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**  
**Ketua sidang merangkap anggota**  
Giandi Kartasasmita, S.IP., M.A.

: 

**Sekretaris**  
Elisabeth A. Satya Dewi, Ph.D.

: 

**Anggota**  
Dr. Atom Ginting Munthe

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

  
Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sherly Megaputri

NPM : 2014330192

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Implementasi Diplomasi Multi-Jalur oleh Pemerintah Australia dan *UN Women* dalam Merespons Isu Kekerasan terhadap Perempuan di Negara-negara Pasifik

dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 7 Juni 2018



Sherly Megaputri

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur tak terhingga ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pedoman religius penulis dalam berkehidupan, termasuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Karya ilmiah “Implementasi Diplomasi Multi-Jalur oleh Pemerintah Australia dan *UN Women* dalam merespons Kekerasan terhadap Perempuan di Negara-negara Pasifik” ini melengkapi perjalanan akhir penulis sebagai mahasiswa strata satu. Mengaplikasikan teori dan pengetahuan yang penulis peroleh dalam Ilmu Hubungan Internasional, skripsi ini berisi pemaparan mengenai situasi ketidaksetaraan gender di Pasifik yang mengkhawatirkan. Fenomena tersebut dikaitkan dengan respons aktor hubungan internasional dalam bentuk peran dan upaya yang tergolong pengarusutamaan gender.

Dengan demikian, penulis mempersembahkan tulisan ini bagi para perempuan maupun laki-laki di dunia yang terus memperjuangkan kesetaraan gender, khususnya yang berdedikasi dalam mengeliminasi kekerasan berbasis gender. Penulis berharap eksistensi karya tulis ilmiah ini dapat menjadi referensi yang memberikan informasi, inspirasi, dan manfaat bagi pembaca. Berbagai kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini harap dimaklumi; berbagai saran dan kritik membangun terkait skripsi ini akan penulis hargai.

Bandung, 7 Juni 2018

Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur juga ditujukan kepada berbagai orang hebat, baik secara individu maupun dalam institusi tertentu; yang telah memberikan dukungan, semangat, maupun inspirasi selama dua semester terakhir dalam merealisasikan ketertarikan Sherly terhadap isu gender menjadi sebuah skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

*Herry, Yayah Sugiarti, Thomas Herlambang, & Merry Herdiana Putri; for the full trust and compassion bestowed upon me for these past 22 years.*

*Elisabeth Adyiningtyas Satya Dewi; for bearing with my complicated minds and writings, also for being such an understanding and motivating lecturer.*

*Giandi Kartasmita & Atom Ginting Munthe; for inclined to scrutiny this imperfect work and giving your finest input.*

*Taina Williams, Lisa Horiwapu, Betty Hafoka-Blake, & Vanessa Heleta; for the assistance in validating my analysis through data provision, and for making efforts in gender equality.*

*Amy Debora; for being such a magnificent four-years partner in plainly everything, being the second home in Bandung thoughtlessly, and eager to be sister by soul.*

*Grace Jessy Ciputri; for being the kindest by humbly providing emergency shelter in the critical week before my thesis defense.*

*Tini Mini Biti – Amy Debora, Jennifer Kencana, Feby Elvany, & Debora Kristiana; for the eagerness to stick and complete each other throughout the dynamics as young adult in university.*

*Lord of the Rings – Antonius Reynaldo, Saraswati Kartika Malta, Adriana Anjani, Claudia Isabella; for making the serving period in HMPSIHI much buoyant and meaningful, for becoming the wondrous support system even after all the professional circumstances come to an end.*

– **Andini Putri Arijanto & Andri Watto Putra**; for the alacrity in taking part of secretary and treasurer regeneration yet fulfill the role of terrific companion at the same time.

**Delegation of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland – Ari Budi Santosa, M. Ali Tanthowi, & Amy Debora**; for collectively making Diplomacy in Practice much more enjoyable, as well as being a priceless teammate and playmate. Britons never, never, never shall be slaves.

**Arvianty Anissa Ramadhani & Rima Ayudyah Alyanabila**; for the countless encouragement and reminding each other the importance of going forward no matter what kind of obstacle intercept.

**Allisa Meinada, Amanda Jilan Dhiya, Isabella Roselinna**; for the once-in-a-year-yet-means-a-world meeting that never fails to spark each other with talks of what the real world is and might be.

**Rosa Widorini & all staff of United Nations High Commissioner for Refugees in Indonesia**; for giving such a marvelous experience which wake me into realization of my passion and interest in humanitarian affairs.

Honorable mention for everybody that has crossed path in engaging with this soul and help her forging exceptional psyche; **Khukhu Siu Yin, Pakpak Asun, HMPSIHI 2015-2016-2017, D. F. A., ASEAN Cooperation Directorate in Ministry of Foreign Affairs, HI Unpar 2014, Harjuna Rizki, Rahmansyah Dwi Cahyo, Alifah Nur Hanifati, Stella Viona, Core Committee of SATURA & PMKT XX, Digital Team of Grey Group Indonesia, and Crew of Warong Sombar. Last but not least; remarkable lecturers of HI Unpar, for the remarkable knowledge and insights; and FISIP Unpar Administration Staff, for making the process easy.**

**Grazie millie,**

**Sherly Mega Putri**

## ABSTRAK

Nama : Sherly Megaputri

NPM : 2014330192

Judul : Implementasi Diplomasi Multi-Jalur oleh Pemerintah Australia dan *UN Women* dalam Merespons Isu Kekerasan terhadap Perempuan di Negara-negara Pasifik

---

Isu kemanusiaan yang sering menjadi masalah di negara berkembang, kerap bersinggungan dengan isu gender. Memiliki predikat sebagai kawasan dengan prevalensi data kekerasan tertinggi, negara-negara di Pasifik memiliki berbagai faktor penyebab yang memaklumi praktik dominansi dan diskriminasi gender dalam masyarakatnya. Merespons fenomena ini, pemerintah di negara-negara Pasifik kerap mendapatkan bantuan dari aktor hubungan internasional yang lain, salah satunya adalah *UN Women*. Dengan dukungan dari Pemerintah Australia, badan PBB tersebut membantu berbagai pihak dari beragam kalangan di Pasifik untuk mewujudkan upaya mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk ketidaksetaraan gender paling menonjol di kawasan Pasifik. Keterlibatan berbagai pihak dari beragam kalangan menunjukkan adanya keterkaitan antara aktor dalam Diplomasi Multi-Jalur dengan program yang diinisiasi oleh *UN Women*. Menggunakan teori Diplomasi Multi-Jalur dan konsep Kekerasan Berbasis Gender, penelitian ini mengidentifikasi keterlibatan kesembilan aktor Diplomasi Muti-Jalur dalam merespons isu kekerasan terhadap perempuan di Pasifik. Respons tersebut menjadi salah satu upaya perwujudan perdamaian dunia, yang juga menjadi tujuan akhir Diplomasi Multi-Jalur itu sendiri. Hasil dari respons tersebut berwujud partisipasi serta kontribusi mereka dalam program “*From Policy to Action: Ending Violence against Women and Girls in the Pacific*”, yang teridentifikasi dalam 11 program turunan hasil inisiasi berbagai kalangan.

Kata kunci: kesetaraan gender, bantuan luar negeri, organisasi internasional, Pasifik, Diplomasi Multi-Jalur, perdamaian.

## **ABSTRACT**

*Name* : Sherly Megaputri  
*Student Number* : 2014330192  
*Title* : *Implementation of Multi-Track Diplomacy by Australian Government and UN Women in Responding Violence against Women Issue in Pacific Countries*

---

*Humanitarian issue that often raised as a problem for developing countries, is most likely linked to gender issue. Having the label as region with the highest violence data prevalence, Pacific Islands countries possess assorted factors that tolerating the practice of dominance and discrimination of gender amongst their societies. Responding this phenomenon, the government in Pacific Islands countries are oftentimes receiving assistance from other international relations actor, in which one of them is UN Women. With the support from Australian government, this UN body assist numerous institutions from various level in making the effort to eliminate violence against women as the most protrude form of gender discrimination in Pacific. Involvement of other parties from diverse groups indicate the relations between actors of Multi-Track Diplomacy with the program initiated by UN Women. Using theory of Multi-Track Diplomacy and concept of Gender-Based Violence, this research identify the participation and contribution made by the nine tracks in responding violence against women issue in the Pacific. The response itself is one of the world peace endeavors, that is also the ultimate purpose of Multi-Track Diplomacy. Result of this response shaped in their participation and contribution for “From Policy to Action: Ending Violence against Women and Girls in the Pacific” program, that identified within the 11 sub-programs initiated by diversified parties.*

*Keywords: gender equality, foreign aids, international organization, Pacific, Multi-Track Diplomacy, peace.*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I - PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1 LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
I.2 IDENTIFIKASI MASALAH .....	6
I.2.1 Deskripsi Masalah .....	6
I.2.2 Pembatasan Masalah .....	9
I.2.3 Rumusan Masalah .....	10
I.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	10
I.3.1 Tujuan Penelitian.....	10
I.3.2 Kegunaan Penelitian.....	11
I.4 STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	11
I.4.1 Studi Pustaka .....	11
I.4.2 Kerangka Pemikiran .....	15
I.4.2.1 Konsep Kekerasan Berbasis Gender .....	16
I.4.2.2 Teori Diplomasi Multi-Jalur .....	20
I.5 METODE DAN TEKNIK PENELITIAN .....	26
I.5.1 Metodologi Penelitian .....	26
I.5.2 Teknik Pengumpulan Data .....	26
I.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	27
<b>BAB II - KETIDAKSETARAAN GENDER TERHADAP PEREMPUAN DI NEGARA-NEGARA PASIFIK</b> .....	<b>29</b>
II.1 Kekerasan berbasis Gender terhadap Perempuan di tengah Masyarakat Negara-negara Pasifik .....	30
II.2 Penyebab Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan di Negara-negara Pasifik.....	35
II.3 Pengaruh Kekerasan berbasis Gender terhadap Perkembangan Kehidupan Sosial Ekonomi .....	42

II.4 Upaya Pemerintah Negara-negara Pasifik dalam Merespons Kekerasan Berbasis Gender .....	44
<b>BAB III - UN WOMEN, AUSTRALIA, DAN PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI NEGERA-NEGERA PASIFIK .....</b>	
<b>PASIFIK .....</b>	<b>48</b>
III.1 Profil <i>UN Women</i> .....	49
III.2 Kehadiran <i>UN Women</i> di Pasifik .....	52
III.3 <i>Pacific Regional Ending Violence against Women and Girls Fund</i> .....	53
III.4 Australia sebagai Negara Pemberi Donor Terbesar .....	57
<b>BAB IV - DIPLOMASI MULTI-JALUR DALAM MERESPONS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI NEGERA-NEGERA PASIFIK .....</b>	
<b>PASIFIK .....</b>	<b>62</b>
IV.1 Program “ <i>From Policy to Action: Ending Violence against Women and Girls in the Pacific</i> ” sebagai implementasi Jalur Pertama, Kedua, dan Kedelapan .....	63
IV.2 KEPULAUAN SOLOMON .....	66
IV.2.1 Program ‘ <i>Digital Story Documentation on Survivors of Violence</i> ’ sebagai implementasi Jalur Kedua, Keenam, Ketujuh, dan Kesembilan ..	66
IV.2.2 Program ‘ <i>Setting the stage to break the cycle of violence</i> ’ sebagai implementasi Jalur Kedua, Keempat, dan Kelima .....	70
IV.2.3 Program penjangkauan masyarakat ( <i>community outreach</i> ) sebagai implementasi Jalur Kedua dan Keenam .....	72
IV.2.4 Program rehabilitasi dan pelatihan pelaku kekerasan sebagai implementasi Jalur Pertama, Kedua, dan Keenam .....	75
IV.3 SAMOA .....	77
IV.3.1 Program “ <i>24-Hour Help Line</i> ” sebagai implementasi Jalur Kedua, Ketiga, Keempat, dan Keenam .....	77
IV.3.2 Program “ <i>Disability Inclusive Toolkit</i> ” sebagai implementasi Jalur Pertama, Kedua, Keempat, Kelima, dan Keenam .....	79
IV.4 TONGA .....	81
IV.4.1 Program “ <i>Putting an End to Violence against Women through a Transformational Leadership Approach</i> ” sebagai implementasi Jalur Kedua .....	81
IV.4.2 Program “ <i>My Body! My Rights!</i> ” sebagai implementasi Jalur Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Keenam, dan Kesembilan .....	83
IV.4.3 Program “ <i>Male Advocacy Training on Ending Violence against Women and Girls</i> ” sebagai implementasi Jalur Kedua, Keenam, Ketujuh, dan Kedelapan .....	87
IV.4.4 Program “ <i>Promote Non-Violence Community for Women and Girls</i> ” sebagai implementasi Jalur Kedua .....	91

IV.4.5 Program “*Implementation of the Family Protection Act*” sebagai implementasi Jalur Pertama ..... 92

<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Kategorisasi tindak kekerasan .....	19
--	----

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Matriks Diplomasi Multi-Jalur .....	22
<b>Gambar 4.1</b> Video dokumenter “ <i>Breaking the Culture of Silence</i> ” .....	69

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 2.1</b> Persentase perempuan umur 15-49 yang mengalami <i>intimate partner violence</i> di Kepulauan Solomon, tahun 2009.....	33
<b>Grafik 2.2</b> Persentase perempuan Samoa yang melaporkan tindak kekerasan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, tahun 2006 .....	43
<b>Grafik 3.1</b> Struktur aliran dana <i>Pacific Fund</i> .....	55

## DAFTAR SINGKATAN

BSP	: <i>Bank of the South Pacific</i>
CCC	: <i>(Solomon Islands) Christian Care Centre</i>
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
CSW	: <i>Commission on the Status of Women</i>
DAW	: <i>Division for the Advancement of Women</i>
DFAT	: <i>Department of Foreign Affairs and Trade</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
FPA	: <i>Family Protection Act</i>
FSC	: <i>(Solomon Islands) Family Support Centre</i>
FSO	: <i>Family Support Organization</i>
GLOW	: <i>'Girls Leading Our World'</i>
GPPAC	: <i>Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
IFAD	: <i>International Fund for Agriculture Development</i>
INSTRAW	: <i>International Research and Training Institute for the Advancement of Women</i>
Kemendagri	: <i>Kementerian Dalam Negeri</i>
MCO	: <i>Multi-Country Office</i>
MFf	: <i>Ma'a Fafine mo e Famili (Tonga)</i>
NOLA	: <i>Nuanua o le Alofa</i>
OSAGI	: <i>Office for the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PDF	: <i>Pacific Disability Forum</i>
PNAVAW	: <i>Pacific Network against Violence Against Women</i>
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SIFHSS	: <i>Solomon Islands Family Health and Support Study</i>

SMART	: <i>Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Limited</i>
SVSG	: <i>Samoa Victim Support Group</i>
TNCWC	: <i>The Tonga National Centre for Women and Children</i>
TPI	: <i>Talitha Project Incorporation</i>
WCCC	: <i>The Women and Child Crisis Centre</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UN Women	: <i>United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</i>
UNESCO	: <i>United Nations Education, Scientific, and Cultural Organization</i>
UNFPA	: <i>United Nations Population Fund</i>
UNIFEM	: <i>United Nations Development Fund for Women</i>
USPC	: <i>United States Peace Corps</i>
VBMS	: <i>Vois Blong Mere Solomon</i>
WFP	: <i>World Food Programme</i>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Pertanyaan wawancara Taina Williams, <i>Regional Project Associate of Ending Violence against Women of UN Women</i> .....	102
<b>Lampiran 2.</b> Pertanyaan wawancara Lisa Horiwapu, <i>Program and Training Officer of Vois Blong o Mere Solomon</i> .....	102
<b>Lampiran 3.</b> Pertanyaan wawancara Betty Hafoka-Blake, <i>President of Ma'a Fafini mo e Famili</i> .....	103
<b>Lampiran 4.</b> Pertanyaan wawancara Vanessa Heleta, <i>Director of Talitha Project</i> .....	103

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Ketika perbincangan mengenai seksualitas masih dianggap tabu, namun tindak pelecehan maupun kekerasan masih dianggap normal, apakah kita akan terus membiarkan diskriminasi gender terjadi di sekitar kita? Tindak diskriminasi gender selalu bisa terjadi kepada siapapun; terhadap laki-laki maupun perempuan, masih berumur muda hingga usia lanjut, dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Dalam menanggapi isu tersebut, pemerintah tidaklah sendirian. Kolaborasi pemerintah dengan organisasi internasional dalam menanggapi isu-isu non tradisional sudah tidak asing lagi untuk dilakukan di dunia internasional saat ini, didukung pula dengan perkembangan diplomasi.

Komunikasi dan kerja sama internasional yang semakin kompleks tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dengan segala interaksinya di era milenium ketiga ini. Baik dalam konteks negara, kelompok, maupun individu; melibatkan dua pihak atau lebih; bersifat komersil maupun pemerintahan, hubungan timbal balik yang terjalin berpartisipasi dalam kedinamisan hubungan internasional. Polarisasi kekuatan politik global yang semakin tereduksi pada akhir dekade 1990an mendorong transisi hubungan internasional menjadi lebih intens dan terbuka.<sup>1</sup> Batas geografi secara harafiah atau

---

<sup>1</sup> Lewis, David. *The Management of Non-Governmental Development Organizations: An Introduction*, (London: Routledge, 2001), hal. 44

batas geopolitik yang ada tidak lagi menjadi hambatan hubungan antar aktor negara, aktor negara dengan aktor non-negara, maupun antar aktor non-negara. Secara gamblang, hampir semua badan pemerintah maupun perusahaan transnasional di dunia saat ini memiliki unit khusus kerja sama internasional.

Pengelompokan negara-negara secara geografis, atau yang biasa disebut kawasan, pun tidak lagi hanya berdasarkan kepentingan ekspansi imperialisme negara besar, maupun pemusatan satu aspek kerja sama semata.<sup>2</sup> Kemunculan revolusi teknologi membawa pertumbuhan pasar bebas yang mendorong terciptanya lingkungan kerja sama ekonomi yang lebih kondusif, perbedaan ideologi yang berjalan dengan lebih sinergis, serta peningkatan interdependensi dan integrasi sosial antar aktor hubungan internasional.<sup>3</sup> Kesadaran realitas geopolitik dan dependensi yang sekarang tidak hanya sebatas bidang ekonomi, politik, dan keamanan di masing-masing ‘pilar’nya, membentuk pola kerja sama internasional yang lebih dinamis. Pengikutsertaan aspek sosial dengan bidang-bidang kerja sama yang sudah umum terjalin, membuahkan difusi bidang kerja sama gabungan dua aspek, seperti sosial-ekonomi atau sosial-politik.

Selain perluasan bidang kerja sama, pembentukan pola pikir, hingga rencana strategis pembangunan yang bersifat lebih global menyesuaikan tata ekonomi dunia saat ini, peran aktor non-pemerintah mendapat lebih banyak sorot perhatian. Baik perusahaan transnasional maupun organisasi internasional, aktor yang tidak berkaitan langsung dengan operasional badan pemerintah dianggap lebih

---

<sup>2</sup> Edward D. Mansfield dan Helen V. Milner “The New Wave of Regionalism” dalam *Comparative Regionalism* (Surrey: Ashgate Publishing, 2009), hal. 167

<sup>3</sup> Foqué, René, dan Jacques Steenbergen. "Regionalism: A Constitutional Framework for Global Challenges?" dalam jurnal *Global Politics of Regionalism: Theory and Practice*, diedit oleh Farrell Mary, Hettne Björn, dan Van Langenhove Luk, (London: Pluto Press, 2005), hal. 54-68.

luwes untuk berdinamika dalam hubungan internasional.<sup>4</sup> Ketika resolusi konflik dibutuhkan misalnya, alih-alih intervensi kemanusiaan, banyak negara yang lebih memilih jalur penyelesaian melalui keterlibatan pihak netral ketiga, yaitu badan penyelesaian sengketa yang berada dibawah organisasi internasional. Sehingga, meskipun negara tetap memainkan perannya sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, organisasi internasional menjadi salah satu aktor pengembang yang dapat lebih fleksibel merespons permasalahan global.<sup>5</sup> Eksistensi aktor-aktor non-negara dan politik luar negeri yang melampaui batas wilayah konvensional ini menandakan perkembangan pergerakan isu-isu nontradisional dalam hubungan internasional sendiri.

Tidak seperti isu tradisional yang sarat akan nilai-nilai klasik keamanan negara dan perang, fenomena sosial yang meliputi aspek kemanusiaan, budaya, dan alam – sebagai bagian dari isu nontradisional – menjadi perhatian warga dunia. Banyak organisasi regional yang kini menempatkan sosial-budaya sebagai salah satu pilar penopang yang mengarahkan orientasi dan mobilitas organisasi. Beragam konvensi internasional juga turut menyorot isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai salah satu isu untuk diprioritaskan. Dalam rangka menjunjung tinggi HAM di dunia, cabang-cabang aspek HAM seperti hak untuk bebas berpendapat, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk melakukan kegiatan jual beli, hingga hak untuk mendapat perlakuan yang sama terlepas dari seks yang dimiliki, dibahas secara lebih spesifik dan mendapat perencanaan strategis untuk rencana

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 112

<sup>5</sup> Thomas G. Weiss, D. Connor Seyle, Kelsey Coolidge, “*The Rise of Non-State Actors in Global Governance: Opportunities and Limitations*”, (London: One Earth Future, 2013), hal. 4.

implementasi jangka panjang. Hingga saat ini, isu yang terakhir masih menjadi salah satu permasalahan global yang serius.

Seiring dengan berkembangnya paham feminisme dalam sistem internasional, keberagaman gender dalam berbagai bidang pekerjaan sudah cukup banyak di era modern ini. Partisipasi politik, keterlibatan dalam pembangunan, hingga proses memperoleh pendidikan sudah dicapai oleh banyak perempuan di dunia.<sup>6</sup> Konseptualisasi komunikasi baik dalam ranah fungsi sosial, ekspresif, maupun instrumental yang diaplikasikan perempuan tak lagi terkungkung oleh pandangan bahwa perempuan seyogyanya berada dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh maskulinitas. Keterlibatan perempuan dalam beragam profesi yang dahulu dipandang hanya layak untuk disandang oleh kaum laki-laki, serta pemberian hak perempuan untuk turut menyuarakan pandangannya – seperti memberikan suara dalam mewujudkan proses demokrasi negara misalnya – semakin menipiskan limitasi perempuan yang dahulu hanya berkutat di ‘sumur, dapur, dan kasur’.

Kaum laki-laki juga bergerak untuk meminimalisir persepsi antarpersona yang selalu memberikan predikat terhadap mereka sebagai makhluk dengan tingkat sensitivitas rendah dan identik dengan kekerasan. Partisipasi laki-laki di berbagai bidang yang dilabeli feminin, seperti dunia masak atau fesyen, semakin mengesampingkan fenomena kesenjangan gender. Pemberitaan daring maupun televisi, adegan film, lirik lagu, hingga literatur, menjadi sejumlah instrumen dalam meningkatkan kesadaran mengenai kesetaraan gender di tengah masyarakat global.

---

<sup>6</sup> Murphy, Craig N., “Seeing women, recognizing gender, recasting international relations” dalam jurnal *International Organization Vol. 50, No. 3*, (The MIT Press, 1996) hal. 514

Kemajuan perwujudan kesetaraan gender tersebut kemudian dilanda problematika yang cukup mengganggu, dengan masih sering ditemuinya diskriminasi gender di berbagai negara di dunia. Tak memandang status negara maju maupun negara berkembang, permasalahan ketidaksetaraan gender tersebut cukup mengkhawatirkan hingga masuk menjadi salah satu fokus area para aktor hubungan internasional, baik bagi pemerintah maupun organisasi internasional. Hal ini turut didorong oleh pemahaman masyarakat umum yang belum dapat mengklasifikasikan definisi ‘seks’ dan ‘gender’ secara komprehensif. Pada hakikatnya, ‘seks’ merupakan ciri manusia yang bersifat biologis, secara kodrati melekat di diri manusia, tidak bisa ditukar maupun diperdebatkan, dan berlaku di semua tempat. Sedangkan ‘gender’ merupakan peran, aktivitas, dan relasi manusia berdasarkan aspek sosial, politik, dan budaya, yang dikonstruksikan dan disosialisasikan oleh manusia pula, serta dinamis dengan perubahan waktu maupun tempat.<sup>7</sup> ‘Alat kelamin’, ‘menstruasi’, dan ‘mimpi basah’, bukanlah gender; ‘sensitif’, ‘mesum’, dan ‘lemah’ bukanlah seks.

Ketika ‘seks’ dan ‘gender’ berada dalam satu koridor dan bercampur aduk, ‘ketidakwajaran’ pun muncul. Ketidakwajaran tersebut umumnya dipengaruhi oleh budaya, khususnya budaya patriarki<sup>8</sup> yang bersifat maskulin, dan berujung pada ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki. Hal-hal seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan kekerasan adalah bentuk-bentuk ketidakadilan yang dapat dan sering dialami, baik oleh perempuan maupun laki-laki, ketika orang lain

---

<sup>7</sup> UN Women, “*How to Design Projects to End Violence against Women and Girls: A step-by-step guide to taking action*”, 2015. Hal. 16

<sup>8</sup> Weedon, Christ, “*Feminist Practices and Post Structuralist Theory*” (London : Blackwell, 1989)

menganggap mereka ‘menyimpang’ dari pemahaman gender yang terpatri dalam masyarakat umum.

Kembali kepada pembahasan mengenai kesetaraan gender di masa sekarang, pemenuhan hak untuk perempuan dibanding laki-laki memang sudah jauh lebih baik jika menilik komparasi keadaan puluhan tahun silam. Meskipun begitu, diskriminasi gender masih mengakar di tengah masyarakat, khususnya yang menempatkan kaum perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Komparasi pendapatan maupun tingkat harapan hidup, prevalensi literasi, hingga tingkat partisipasi di tingkat parlemen maupun kementerian, masih menunjukkan adanya ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.<sup>9</sup> Dalam konteks ini, perempuan lebih sering berada dalam posisi yang dirugikan dibanding laki-laki.

## **I.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

### **I.2.1 Deskripsi Masalah**

Berdasarkan gejala, fenomena, dan fakta yang telah diuraikan sebelumnya dalam Latar Belakang Masalah, dapat dikemukakan bahwa diskriminasi gender sebagai salah satu permasalahan global membawa pokok-pokok permasalahan yang lain. Berbagai bentuk ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, hingga sosial-budaya berada dalam daftar permasalahan tersebut, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Di bidang sosial-budaya sendiri, konteks ketidakadilan dalam bentuk kekerasan lebih sering merugikan perempuan, baik secara psikis, fisik, sosial, ekonomi, maupun seksual.

---

<sup>9</sup> World Economic Forum, “*The Global Gender Gap Report*”, (Geneva: 2017), hal. 26

Pernyataan tersebut dibuktikan salah satunya dengan kenyataan bahwa masih banyak kasus tindak kekerasan terhadap perempuan, baik dalam skala regional maupun global. Dibanding bahaya penyakit kronis seperti kanker dan malaria, atau peristiwa berbahaya seperti kecelakaan dan perang, menurut Bank Dunia tindak pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga lebih beresiko dihadapi oleh perempuan dengan kisaran usia 15 hingga 44 tahun.<sup>10</sup> Efek yang didapat oleh para korban kekerasan ini pun banyak yang berjangka menengah hingga panjang, mempengaruhi kehidupan sehari-hari korban dan orang-orang di sekitarnya.

Merespon fenomena ini, banyak organisasi internasional maupun domestik, baik yang berafiliasi dengan pemerintah maupun non-pemerintah, bergerak untuk meminimalisir peningkatan intensitas kejadian kekerasan terhadap perempuan. *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women)* sebagai organisasi pemberdayaan perempuan terbesar di dunia menjadi salah satu penggerak yang mengusahakan kesetaraan gender lewat penghapusan kekerasan terhadap perempuan. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang diratifikasi oleh 187 negara dan diadopsi oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1981 menjadi dasar dan pedoman *UN Women* dalam mengusahakan hal tersebut.<sup>11</sup> Konvensi ini menjadi traktat yang berperan sebagai salah satu elemen utama dalam konvensi hak-hak kemanusiaan di seluruh dunia, mengingat inti perjanjian

---

<sup>10</sup> UN Women, “*Eliminating Violence against Women*”, 2017, diakses pada 17 Agustus 2017 di <<https://unwomen.org.au/our-work/focus-areas/eliminating-violence-against-women/>>

<sup>11</sup> UN Women Field Office of Asia and the Pacific, “*Frequently Asked Questions (FAQ) about CEDAW*”, 2017, diakses pada 24 Agustus 2017 di <<http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/faq#whatiscedaw>>

CEDAW sendiri juga mengacu pada target perdamaian dunia, yang juga difasilitasi oleh perumusan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yakni tujuan kelima – “*Gender Equality*”.

Terkait usaha dalam menghilangkan kekerasan terhadap perempuan sebagai upaya mengimplementasikan CEDAW, *UN Women* memiliki berbagai dana perwalian serta program kampanye. Seperti *UN Trust Fund to End Violence against Women* dan kampanye Sekretaris Jenderal PBB, *UNiTE to End Violence against Women*.<sup>12</sup> Bekerja sama dengan berbagai pihak di beragam kalangan, *UN Women* berdinamika di sektor penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui akses layanan jasa – seperti bantuan hukum, konseling psikososial, dan perawatan kesehatan – serta penguatan implementasi hukum, kebijakan, dan rencana aksi. Pengupayaan tersebut tersebar di seluruh kawasan, termasuk kawasan Pasifik, yang memiliki predikat pemegang prevalensi data kekerasan tertinggi di dunia.

Upaya mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan di Pasifik juga didukung oleh badan pemerintah, Australia salah satunya. Sebagai salah satu negara dengan letak geografis terdekat dengan negara-negara Pasifik, Australia sering menjadi negara pemberi bantuan kemanusiaan. Hal ini juga didorong oleh fokus perhatian pemerintah terhadap kesetaraan gender, khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.<sup>13</sup> Fokus tersebut diwujudkan lewat rencana anggaran, kebijakan, serta kemitraan dengan berbagai organisasi, salah satunya

---

<sup>12</sup> UN Women Asia and the Pacific, “*UN Trust Fund to End Violence Against Women*”, 2017, diakses pada 14 Oktober 2017 di <<http://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence-against-women/un-trust-fund-to-end-violence>>

<sup>13</sup> Australia Department of Foreign Affairs and Trade, “*Gender initiatives*”, diakses pada 14 Oktober 2017 di <<http://dfat.gov.au/aid/topics/investment-priorities/gender-equality-empowering-women-girls/gender-equality/Pages/gender-initiatives.aspx>>

dengan *UN Women*. Menjadi salah satu negara peratifikasi CEDAW sekaligus negara pemberi donor terbesar untuk *UN Women*, Australia turut andil memerangi pelaku kekerasan dengan menjadi kontributor di berbagai program yang menggunakan dana perwalian hasil inisiatif *UN Women*. Salah satu program di Pasifik yang mendapat kontribusi dalam jumlah besar oleh Pemerintah Australia adalah program “*From Policy to Action: Ending Violence against Women and Girls in the Pacific (Policy to Action)*”.

### **I.2.2 Pembatasan Masalah**

Mengingat kompleksitas topik sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki fokus pengkajian yang membatasi pembahasan kekerasan terhadap perempuan di negara-negara Pasifik. Adapun dari 14 negara Pasifik yang terdaftar dalam program, penelitian lebih spesifik mengkaji fenomena di tiga negara; yakni Kepulauan Solomon, Samoa, dan Tonga. Ketiga negara tersebut dipilih berdasarkan variasi program yang dijalankan, serta keterlibatan aktor yang memenuhi kesembilan jalur dalam Diplomasi Multi-Jalur.

Pembahasan mencakup peran dan respons berbagai aktor yang berpartisipasi dalam program “*Policy to Action*”, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan kekerasan. Dalam program tersebut penerima manfaat adalah perempuan di tiga fokus negara Pasifik, yang pada umumnya berusia muda dengan kisaran umur belasan tahun, namun tidak membatasi maksimal umur. Hal ini disebabkan oleh rentang usia peserta program yang beragam. Selain itu, fokus penelitian meliputi bentuk-bentuk partisipasi aktor Diplomasi Multi-Jalur dalam

program tersebut. Fokus pembatasan waktu penelitian sendiri mengikuti periode waktu pelaksanaan program “*Policy to Action*”. Dengan demikian pengkajian ditandai dengan program yang berjalan dari tahun 2013 hingga program yang dijalankan dan berakhir pada tahun 2017.

### **I.2.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang tertera dalam Latar Belakang, Identifikasi Masalah, serta Pembatasan Masalah sebelumnya, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

**“Bagaimana implementasi Diplomasi Multi-Jalur oleh Pemerintah Australia dan *UN Women* dalam merespons isu kekerasan terhadap perempuan di Kepulauan Solomon, Samoa, dan Tonga?”**

## **I.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **I.3.1 Tujuan Penelitian**

Selain untuk mengimplementasikan teori-teori studi Hubungan Internasional ke dalam analisis, penelitian bertujuan untuk memperlihatkan suatu peran yang kompleks dari kolaborasi pihak pemerintah dan organisasi internasional dalam merespons isu global, menganalisis inisiatif Pemerintah Australia dalam meningkatkan kesetaraan gender, mengkaji peranan *UN Women* dalam mengupayakan penghapusan diskriminasi gender, menelaah kerja sama internasional yang terjalin antara Pemerintah Australia dengan *UN Women* dalam menyampaikan pesan tentang resiko tinggi kekerasan terhadap perempuan di

kawasan Pasifik, serta mengidentifikasi peranan aktor Diplomasi Multi-Jalur dalam berpartisipasi merespons isu kekerasan terhadap perempuan di negara-negara Pasifik.

### **I.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan keluaran penelitian yang memiliki nilai mutu dan relevansi bagi pengembangan studi Ilmu Hubungan Internasional. Secara lebih spesifik, dalam bidang diplomasi dan kerja sama antar aktor hubungan internasional. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan secara praktis dan digunakan pada masa mendatang, khususnya bagi pemerhati kegiatan hubungan internasional di bidang diplomasi dan organisasi internasional, serta pemerhati isu kesetaraan gender sebagai referensi penelitian.

## **I.4 STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

### **I.4.1 Studi Pustaka**

Telaah terkait topik penelitian sebagai referensi empiris dapat ditemukan di sejumlah buku-buku akademik dan jurnal ilmiah, antara lain “*Gender and International Relations*” karya Jill Steans, “*Track Two Diplomacy and the Transfer of Peacebuilding Capacity*” karya Bruce W. Dayton, dan “*Against Domestic Violence: The Interaction of Global Networks with Local Activism in Central Europe*” karya Katalin Fábíán.

Dalam literatur yang pertama, buku ‘*Gender and International Relations*’ mengambil studi kasus pembentukan dan penandatanganan CEDAW pada periode

waktu tahun 1976 – 1985.<sup>14</sup> Steans berargumen bahwa peran organisasi-organisasi internasional non-pemerintah semakin meningkat perihal advokasi untuk para perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya di segala bidang, serta gencar dalam memonitor berjalannya pengimplementasian upaya kesetaraan gender di dunia.

CEDAW dianggap menjadi salah satu pencapaian terbesar *UN Women* selaku organisasi internasional yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dunia yang terdiskriminasi.<sup>15</sup> Meskipun pada awalnya CEDAW dikritisi oleh beberapa pihak terkait sejumlah aspek – seperti perbendaharaan kata yang dianggap tidak cukup mengikat – namun kesadaran bahwa apabila konteks sosial, budaya, dan ekonomi tidak dipertegas dengan baik dan masih disetir oleh peranan gender ‘tradisional’ yang sarat akan ketidaksetaraan dan diskriminasi, maka HAM akan tidak bermakna.

Argumen dan penjabaran dalam buku ini menunjukkan bahwa keberhasilan CEDAW mengumpulkan negara-negara peratifikasi dalam jumlah besar membuka gerbang bagi para organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan partisipasinya. Baik di tingkat nasional maupun regional, organisasi non-pemerintah mengambil peran dalam mengidentifikasi, mengawasi, dan mempublikasikan implementasi regulasi terkait penghapusan diskriminasi gender. Hal tersebut dilakukan juga sebagai bentuk ‘transparansi’ jaringan komunikasi terhadap masyarakat global. Literatur ini diharapkan dapat membantu proses analisis dalam penelitian terkait peran *UN Women* dalam memperkuat formulasi kebijakan, memfasilitasi program

---

<sup>14</sup> Steans, Jill. “*Gender and International Relations*”, (Cambridge: Polity Press, 2013), hal. 33.

<sup>15</sup> *Ibid.*

yang diinisiasi organisasi non-pemerintah, serta menjembatani kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat sipil, berkaitan dengan isu kesetaraan gender.

Literatur kedua, artikel jurnal “*Track Two Diplomacy and the Transfer of Peacebuilding Capacity*” berisi argumen Dayton terkait peningkatan intensitas keterlibatan aktor non-pemerintah. Dalam rangka mempromosikan perdamaian dunia, baik dalam konteks antar negara maupun antar kelompok, saat ini pemerintah cenderung mencari bantuan kepada ahli resolusi konflik. Di berbagai kesempatan, ahli resolusi konflik tersebut lebih sering dalam bentuk organisasi internasional. Baik berstatus non-pemerintah maupun berafiliasi dengan pemerintah, organisasi internasional menjadi salah satu alternatif favorit.

Mengambil studi kasus antara Meksiko dan El Salvador, resolusi konflik dengan melibatkan organisasi internasional ditempuh tak lain untuk mengesampingkan ego masing-masing, duduk bersama, dan mengikuti rangkaian aktivitas dialog yang difasilitasi oleh pihak netral ketiga.<sup>16</sup> Keterlibatan pihak netral ketiga yang menjadi salah satu aktor dalam menjalankan ‘*Track Two Diplomacy*’ ini dipandang dapat membantu pembuatan keputusan yang dapat menjembatani kepentingan dan kehendak kedua belah pihak, dibanding jika proses negosiasi dijalankan oleh dua negara saja.

Selain dalam proses *peacebuilding*, ‘*Track Two Diplomacy*’ sebagai salah satu cabang Diplomasi Multi-Jalur digunakan untuk memfasilitasi komunikasi berbagai level dalam menyampaikan kepentingannya. Argumen dan penjelasan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa ‘*Track Two Diplomacy*’ dengan organisasi

---

<sup>16</sup> Dayton, Bruce W., “*Track Two Diplomacy and the Transfer of Peacebuilding Capacity*” dalam jurnal *Transnational Transfers and Global Development* (2012): 68.

internasional sebagai ‘bintang’nya tidak hanya efektif dalam resolusi konflik, namun juga dapat diaplikasikan dalam permasalahan yang lain, termasuk permasalahan sosial-budaya. Literatur ini diharapkan dapat membantu proses analisis dalam penelitian terkait kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Australia dengan *UN Women* dalam konteks Diplomasi Multi-Jalur.

Literatur ketiga, yakni artikel jurnal “*Against Domestic Violence: The Interaction of Global Networks with Local Activism in Central Europe*”, berisi pembahasan Fábíán mengenai isu kekerasan terhadap perempuan yang baru mendapat perhatian pada tahun 1989, berdasarkan studi kasus yang terjadi di sejumlah negara Eropa; seperti Hungaria, Slovakia, Polandia, Republik Ceko, dan Slovenia. Fábíán mengemukakan argumen bahwa sebelum tahun 2000 masih banyak orang dengan pemahaman bahwa kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) tidak termasuk sebagai isu yang penting, karena ‘amat jarang terjadi’.<sup>17</sup> Sikap penyangkalan terhadap kenyataan tersebut membawa konsep kesetaraan gender ke dimensi yang berkaitan dengan perubahan persepsi publik, serta terjadinya pergantian budaya politik dalam memahami tindak kekerasan yang terjadi dalam suatu hubungan. Seiring dengan meningkatnya pengaruh organisasi non-pemerintah di masa sekarang, perhatian menyangkut isu kekerasan terhadap perempuan pun menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam membuat kebijakan, maupun mempertimbangkan partisipasi politik untuk perempuan. Selanjutnya perkembangan isu kekerasan pun memasuki ranah regional hingga internasional.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Argumen dan pemaparan dalam jurnal ini menunjukkan bahwa pergerakan isu non-tradisional semakin menyita perhatian banyak aktor dalam hubungan internasional, salah satunya berfokus mengenai kekerasan terhadap perempuan. Isu tersebut bukan lagi semata-mata ‘hanya sebuah kejadian’, tidak lagi dipandang remeh, dan hanya setingkat urusan domestik. Literatur ini diharapkan dapat membantu proses analisis dalam penelitian terkait respons aktor-aktor hubungan internasional, yang dalam konteks penelitian ini merupakan Pemerintah Australia dan *UN Women*, dalam menanggapi isu kekerasan terhadap perempuan di tingkat negara maupun kawasan.

Dari ketiga tinjauan pustaka yang telah dipaparkan sebelumnya, topik penelitian yang mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan dengan kaitannya terhadap Diplomasi Multi-Jalur pun menjadi menarik. Hal ini disebabkan oleh ranah kajian studi Diplomasi Multi-Jalur yang biasanya menyangkut isu resolusi konflik, dengan fokus penyebab konflik umumnya terkait kepentingan nasional. Penelitian ini diharapkan dapat menggali ranah kajian Diplomasi Multi-Jalur secara lebih dalam dan beragam, serta mengidentifikasi implementasi kerangka Diplomasi Multi-Jalur dalam isu non-tradisional.

#### **I.4.2 Kerangka Pemikiran**

Untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian sekaligus sebagai pengarah skema analisis, lensa atau perspektif analisis dalam penelitian ini akan menggunakan sejumlah teori dan konsep Hubungan Internasional. Adapun lensa analisis yang diaplikasikan adalah konsep Kekerasan Berbasis Gender dan teori

Diplomasi Multi-Jalur. Secara garis besar, seperti yang telah disebutkan dalam pemaparan Latar Belakang sebelumnya, gender merupakan konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat terkait dengan peran, aktivitas, dan relasi manusia yang berhubungan dengan sejumlah aspek kehidupannya. Sedangkan diplomasi merupakan suatu seni bernegosiasi, yang direalisasikan dalam rangka mencapai kepentingan-kepentingan tertentu lewat menjembatani komunikasi dengan pihak lain.

#### **I.4.2.1 Konsep Kekerasan Berbasis Gender**

Secara teoritis, Konsep Kekerasan Berbasis Gender merupakan gambaran mental dari beberapa bidang ilmu yang menjelaskan terjadinya tindak kekerasan sebagai respons terhadap gender seseorang. Dengan kata lain, seseorang dapat melakukan kekerasan terhadap orang lain hanya karena gender yang dimiliki orang tersebut. Kekerasan ini dapat terjadi kepada laki-laki maupun perempuan, namun dalam praktiknya pihak perempuan lebih sering menyandang status sebagai korban. Beberapa konstruksi hipotesis mengelompokkan sejumlah jenis kekerasan, sebagai berikut:

##### 1) Kekerasan sebagai Hasil dari Ketegangan Ekspresif

Ketegangan ekspresif yang dihasilkan dari dorongan impuls dalam diri – seperti rasa marah, cemburu, atau tertekan – disimpulkan sebagai penyebab terbesar seorang individu memilih berbuat kasar.<sup>18</sup> Dalam

---

<sup>18</sup> Gelles, R.J., Straus, M.A., “Determinants of Violence in the Family: Toward a Theoretical Integration” dalam jurnal *Contemporary Theories about the Family Vol. 1* (1979): 67

konteks ini, perilaku tersebut umumnya dilampiaskan di lingkungan keluarga, sebagai tempat terdekat melakukan interaksi dengan individu lain.

## 2) Kekerasan sebagai Strategi Kekuatan Instrumental

Berbeda dengan Kekerasan sebagai Hasil dari Ketegangan Ekspresif, jenis kekerasan ini didasarkan pada keinginan individu untuk secara sadar melakukan tindak kekerasan sebagai usaha untuk mencapai kepentingan tertentu. Konteks kepentingan tersebut mencakup upaya meningkatkan harga diri sebagai identitas, dan menerima ekspektasi normatif.<sup>19</sup> Kekerasan pun menjadi perangkat otoritatif dalam menjaga dominansi dan kekuatan maskulin.<sup>20</sup> Hal ini kemudian berlaku sebagai manifestasi ketika laki-laki ingin menempatkan perempuan di hierarki yang lebih rendah baik dalam strata sosial secara umumnya atau interaksi personal pada khususnya.

## 3) Kekerasan sebagai Dukungan Normatif

Tindak kekerasan dapat dianggap lumrah ketika terdapat norma dalam masyarakat yang percaya bahwa perilaku tersebut menyimpan tujuan lain yang baik. Legitimasi tersebut menjadi sebuah dukungan normatif masyarakat terhadap praktik kekerasan dan pemikiran bahwa tatanan alam

---

<sup>19</sup> Jolanta Reingardienė, “Historical and Theoretical Discourse Surrounding Gender Based Violence Research”, dalam publikasi majalah Vilniaus Universitetas “*Violence in Society: Fictional Stories or Reality?*”, Hal. 89

<sup>20</sup> Kaplan, H. B., “Toward a General Theory of Psychosocial Deviance: The Case of Aggressive Behavior” dalam jurnal publikasi majalah Vilniaus Universitetas “*Violence in Society: Fictional Stories or Reality?*” (2004): 6

memisahkan perempuan sebagai kaum yang lebih inferior. Devaluasi yang demikian mengantarkan perempuan untuk cenderung menyalahkan dirinya sendiri, yang berpotensi terhadap hubungan tidak sehat berjangka panjang.<sup>21</sup> Kekerasan berbasis gender pun lebih mudah terjadi dengan anggapan bahwa sudah seharusnya pihak yang lebih inferior diperlakukan demikian.

#### 4) Kekerasan sebagai Perilaku yang dipelajari

Faktor eksternal lain yang mendorong terjadinya tindak kekerasan adalah manifestasi pembelajaran, yang mana seseorang berkembang dari sekedar mengobservasi peristiwa kekerasan hingga mengimitasi perilaku tersebut. Individu yang sedari kecil menyaksikan peristiwa kekerasan kemudian menganggap hal tersebut sebagai contoh untuk ditiru.<sup>22</sup> Pelanggaran praktik kekerasan melalui transmisi antargenerasi pun terjadi.

Dari keempat konsep tersebut, turunan bentuk kekerasan yang terjadi dalam masyarakat terbagi dalam berapa kategori, yang meliputi fisik, seksual, verbal, sosial, dan finansial. Secara lebih spesifik, pembagian jenis-jenis tindakan kekerasan tersebut antara lain dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

<sup>21</sup> Bograd, M., "Feminist Perspectives on Wife Abuse: An Introduction" dalam jurnal "*Feminist Perspectives on Wife Abuse*", (1988): 27

<sup>22</sup> O'Leary, K. D., "Physical Aggression between Spouses: A Social Learning Theory Perspective" dalam buku *Handbook of Family Violence* (New York: Plenum, 1988), Hal. 45

**Tabel 1.1** Kategorisasi tindak kekerasan

<b>Kekerasan</b>	<b>Tindakan</b>
Fisik	Pemukulan, penamparan, tendangan, penyiksaan, mengikat paksa, memisahkan perempuan dengan disabilitas untuk mengakses alat bantu, merampas obat dalam perawatan, pembakaran, mencekik, mendorong dari tempat yang lebih tinggi, penjambakan, serta menguntit.
Seksual	Pemeriksaan, menyentuh tanpa izin, pemaksaan penetrasi, pemaksaan aktivitas seksual, mengeluarkan komentar seksual yang tidak diinginkan, pemaksaan menonton pornografi, penghinaan seksual, serta menjual perempuan ke perbudakan seks.
Verbal	Meneriaki seseorang, membuat candaan yang menghina, penilaian dan kritik yang berlebihan dan tidak adil, menyebarkan rumor, mempersalahkan perempuan akan sesuatu yang tidak dia lakukan, serta <i>catcalling</i> .
Sosial	Sikap posesif yang berlebihan untuk mengontrol seseorang, ancaman melukai, ancaman mengumbar rahasia, ancaman mengambil anak, ancaman bunuh diri jika ditinggalkan, mengatakan perempuan sebagai sosok yang buruk rupa, menghalangi perempuan untuk bertemu dengan teman atau keluarganya, secara sengaja mempermalukan perempuan di depan umum, serta menentukan apa yang boleh dan tidak untuk dipakai perempuan.
Finansial	Mencegah perempuan mendapatkan atau mencari pekerjaan, memaksa perempuan keluar dari pekerjaannya, mengontrol keuangan perempuan, menahan uang yang akan digunakan untuk keperluan esensial seperti makanan, air, dan pengobatan, serta memaksa perempuan membayar 'utang'.

*Sumber: World Health Organization.*<sup>23</sup>

<sup>23</sup> World Health Organization, "World Report on Violence and Health" (Geneva: WHO Library, 2002), Hal. 37

#### **I.4.2.2 Teori Diplomasi Multi-Jalur**

Dalam konteks hubungan internasional, diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan kebijakan luar negeri suatu negara, mengingat kegiatan ini dikategorikan sebagai kepanjangan tangan kebijakan luar negeri itu sendiri, yang berwujud implementasi.<sup>24</sup> Diplomasi dapat berkembang untuk meraih tujuan bilamana tindak persuasi, kelihaihan dalam berkata, dan negosiasi berhasil dieksekusi dalam kondisi seplural apapun.<sup>25</sup> Dengan demikian, diplomasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai kepentingan, dengan kata-kata sebagai senjata modalnya.

Dalam praktiknya, diplomasi dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi terlatih dari Departemen atau Kementerian Luar Negeri, untuk melakukan negosiasi dengan negara atau entitas lain dalam sistem internasional. Bertujuan untuk memperoleh perdamaian dari pencapaian kesepakatan semua pihak, negosiasi sebagai aktivitas inti dari diplomasi harus dieksekusi dengan komprehensif namun efektif. Pengimplementasian negosiasi terbagi menjadi tiga tahap, meliputi Pra-Negosiasi, Negosiasi Formal, dan Afiriasi.

Implikasi revolusi teknologi dan informasi kemudian membawa perubahan dalam dinamika diplomasi modern. Peran diplomat sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam berdiplomasi semakin terbantuan oleh para aktor non-negara. Kompleksitas birokrasi dalam interaksi resmi antar perwakilan negara, hingga daftar prioritas instruksi diplomasi yang lebih sering menempatkan isu-isu keamanan dan ekonomi negara sebagai aspek teratas, menjadi faktor pendorong

---

<sup>24</sup> Djelantik, Sukawarsini. "*Diplomasi antara Teori dan Praktik*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). Hal. 13.

<sup>25</sup> Eban, Abba. "*Diplomacy for the Next Century*", (New Haven: Yale University Press, 1998). Hal. 28

aktor non-negara untuk turut terlibat dalam proses diplomasi. Logika sederhananya adalah, apabila pemerintah tidak memiliki kapabilitas yang cukup dalam menanggapi dan mengurus permasalahan multi-bidang yang kerap beririsan dengan isu kemanusiaan, hukum, maupun sosial budaya, maka pihak non-pemerintah dapat mengambil inisiatif untuk membantu pemerintah.<sup>26</sup> Berperan sebagai pendukung diplomasi yang diupayakan pemerintah, diplomasi yang bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara perdamaian dunia ini sering disebut sebagai Diplomasi Jalur Kedua.

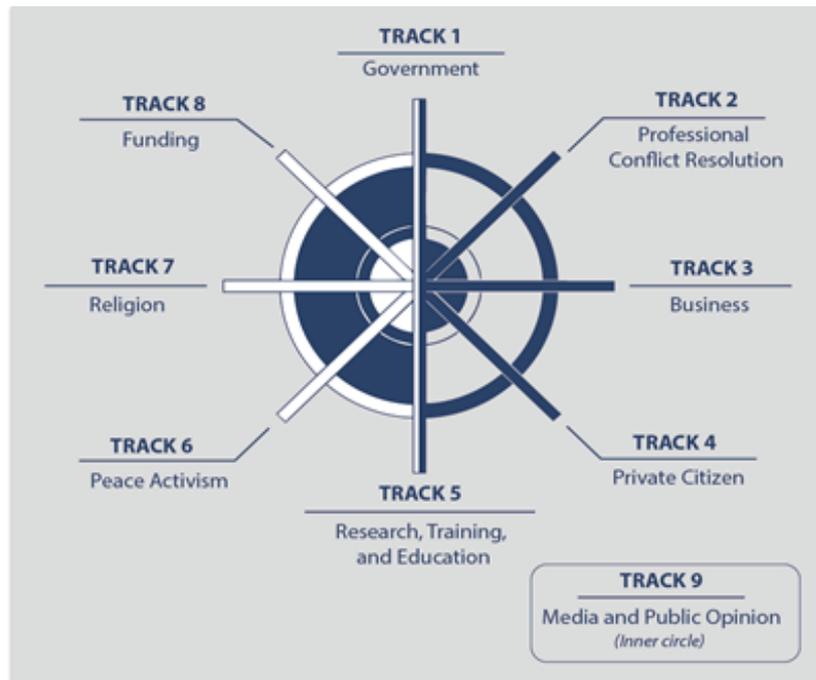
Dalam perkembangannya, jenis diplomasi ini dibagi menjadi lebih spesifik ke dalam Diplomasi Multi-Jalur. Diplomasi ini menggunakan pendekatan yang lebih personal, karena melibatkan masyarakat dengan keberagaman dan kapabilitasnya untuk terjun dalam proses diplomasi. Seluruh lapisan masyarakat dapat difasilitasi oleh Diplomasi Multi-Jalur dalam menentukan kebutuhan dan perangkat untuk menyampaikan kepentingannya.<sup>27</sup> Dengan kata lain, semua orang dapat berpartisipasi untuk melakukan kegiatan diplomasi, sesuai kapasitasnya masing-masing. Adapun konteks ‘semua orang’ yang dimaksud dalam Diplomasi Multi-Jalur meliputi sembilan kalangan, yang dapat dilihat secara singkat dalam gambar 1.1. Kesembilan aktor tersebut meliputi; (1) Pemerintah; (2) Ahli Resolusi Konflik (Organisasi Non-Pemerintah); (3) Sektor Bisnis; (4) Masyarakat Sipil; (5) Lembaga Penelitian, Pelatihan, dan Pendidikan; (6) Aktivistis Perdamaian; (7) Lembaga atau Kelompok Keagamaan; (8) Pendonor Dana; dan (9) Media.

---

<sup>26</sup> L.W. Roeder, Jr. dan A. Simard, “*Diplomacy and Negotiation for Humanitarian NGOs*”, (New York: Springer Nature: 2013). Hal. 24.

<sup>27</sup> Louise Diamond dan John McDonald. “*Multi Track Diplomacy: A Systems Approach to Peace*” (Washington: Institute for Multi-Track Diplomacy, 1991). Hal. 3.

**Gambar 1.1** Matriks Diplomasi Multi-Jalur



Sumber: *Institute for Multi-Track Diplomacy*<sup>28</sup>

Secara lebih rinci, Pemerintah berada dalam koridor yang menuntun adanya dinamika dalam tindakan resmi. Sebagai jalur pertama dalam Diplomasi Multi-Jalur, peran dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah berputar pada diplomasi resmi, formulasi kebijakan, dan regulasi pemerintahan.<sup>29</sup> Segala tindakan yang diambil dilakukan dalam jalur resmi nan formal. Sehingga, proses diplomasi yang berjalan pun bersifat lebih kaku.

Serupa dengan Pemerintah, Ahli Resolusi Konflik – atau yang sering direpresentasikan oleh Organisasi Non-Pemerintah – juga memiliki dinamika yang

<sup>28</sup> Institute for Multi-Track Diplomacy. “*What is Multi-Track Diplomacy?*”. Diakses pada 13 Oktober 2017 di <<http://imtd.org/about/what-is-multi-track-diplomacy/>>

<sup>29</sup> McDonald, John & Diamond, Louise, “*Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace, 3rd Edition*”, (Connecticut: Kumarian Press, 1996), Hal. 25.

cenderung masih bersifat resmi. Jalur kedua dalam Diplomasi Multi-Jalur ini berperan untuk menganalisis, mencegah, memberi solusi, dan mengatur proses resolusi konflik internasional.<sup>30</sup> Lewat pergerakan yang profesional, jalur ini mengutamakan fasilitasi pemeliharaan perdamaian. Dapat muncul dari beragam latar belakang, fasilitas yang disediakan dapat berupa mediasi, konsultasi, lokakarya penyelesaian masalah, konferensi, dan lain sebagainya.

Berpindah ke sektor profesional lain, terdapat Sektor Bisnis sebagai jalur ketiga. Upaya menciptakan perdamaian diwujudkan oleh para aktor dalam sektor bisnis lewat peluang ekonomi. Lapangan kerja, hubungan dagang internasional, kemitraan investasi, hingga kerja sama dalam diplomasi ekonomi menjadi hal pokok yang menunjang partisipasi mereka dalam Diplomasi Multi-Jalur.<sup>31</sup> Baik untuk orientasi profit maupun tujuan kemanusiaan, jalur ini bekerja secara profesional dan resmi namun tanpa kompleksitas yang dimiliki instansi pemerintah.

Berbeda dari tiga jalur sebelumnya, jalur keempat yang direpresentasikan oleh Masyarakat Sipil lebih bersifat tidak kaku. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan personal dalam menyuarakan isu-isu di tingkat akar rumput. Keberpihakan masyarakat terhadap perdamaian ditunjukkan melalui program sukarelawan, program pembangunan, program advokasi, dan lain sebagainya. Berbekal pengetahuan serta pengalaman langsung dengan isu yang diperhatikan, diplomasi yang kerap disebut '*Citizen Diplomacy*' ini menjadi lebih 'representatif' karena masyarakat lebih mengetahui situasi di lapangan.

---

<sup>30</sup> McDonald, John & Diamond, Louise, *Op.cit*, Hal. 34.

<sup>31</sup> McDonald, John & Diamond, Louise, *Op.cit*, Hal. 48

Upaya perwujudan perdamaian oleh Diplomasi Multi-Jalur juga bersinggungan dengan dunia akademis. Lembaga Penelitian, Pelatihan, dan Pendidikan menjadikan proses pembelajaran sebagai alat pendukung. Aktor-aktor dalam jalur ini memproses dan mentransfer informasi-informasi yang relevan untuk penggunaan praktikal aktivitas perdamaian.<sup>32</sup> Dengan demikian, jalur kelima melibatkan pihak-pihak seperti lembaga pemikir, pusat riset, praktisi mediasi dan negosiasi, hingga universitas.

Selain ranah akademis, proses advokasi juga termasuk dalam Diplomasi Multi-Jalur. Sebagai jalur keenam, Aktivis memainkan peran untuk memerhatikan isu-isu lingkungan, kemanusiaan, keadilan sosial-ekonomi, maupun isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Baik keterlibatan dalam organisasi maupun bergerak sebagai individu, Aktivis menyuarakan pesan perdamaian melalui keterlibatan personalnya. Serupa dengan jalur keempat, jalur ini mendorong aktornya untuk berdiplomasi dengan bekal pengetahuan dan pengalaman di tingkat akar rumput.

Selanjutnya posisi aktor di jalur ketujuh diisi oleh Lembaga Keagamaan. Baik bersifat resmi maupun perkumpulan, jalur ini mengupayakan rekonsiliasi dalam komitmen jangka panjang. Komunitas-komunitas kepercayaan tertentu hingga kelompok pecinta damai membantu menyuarakan isu kemanusiaan berbekal keyakinan bahwa perdamaian harus diwujudkan dalam tindakan. Hal ini didukung oleh orientasi gerakan berbasis moral yang mengedepankan tindakan cinta damai dan non-kekerasan.

---

<sup>32</sup> McDonald, John & Diamond, Louise, *Op.cit*, Hal. 68

Kemudian aktor Diplomasi Multi-Jalur yang bergerak di bidang finansial selain Sektor Bisnis juga mencakup Pendorong Dana. Jalur kedelapan ini dapat berwujud organisasi pendanaan, yayasan, hingga dermawan. Bantuan penyediaan dana bagi diberikan bagi pihak-pihak yang berinisiatif memelihara perdamaian dari beragam sektor. Pelaksanaan program maupun survei data berskala besar menjadi wadah yang menampung pendanaan tersebut.

Sebagai penutup, Media menempati posisi jalur kesembilan. Lewat penyebaran informasi, jalur ini merupakan jalur yang mendukung komunikasi internasional untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian bersama antar aktor-aktor hubungan internasional maupun kesemua jalur yang ada. Baik melalui radio, film, video, seni, hingga perangkat elektronik, opini publik dibentuk untuk dapat peka dengan isu dan keadaan sekitar.<sup>33</sup>

Kesembilan jalur tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan berbagi peran krusial, yakni dalam menyambut perubahan positif yang dibawa Diplomasi Jalur Pertama (Pemerintah) dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah dikeluarkan dan diimplementasikan sebagaimana mestinya. Tidak ada satu jalur yang lebih penting dari jalur yang lain, maupun lebih independen dibanding jalur yang lain. Ketika seluruh jalur beroperasi sebagai suatu sistem, dengan pendekatan komprehensif yang berorientasi pada perdamaian berkelanjutan jangka panjang, maka Diplomasi Multi-Jalur dapat berimplikasi secara luar biasa. Maka dari itu, dalam praktiknya, satu aktor dapat berperan sebagai lebih dari satu jalur.

---

<sup>33</sup> McDonald, John & Diamond, Louise, *Op.cit*, Hal. 77

## **I.5 METODE DAN TEKNIK PENELITIAN**

### **I.5.1 Metodologi Penelitian**

Masalah penelitian akan dibahas, diidentifikasi, dan dianalisis berdasarkan fakta serta gejala dari lapangan dalam bentuk analisis deskriptif. Metode Kualitatif akan dipergunakan sebagai langkah-langkah untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian. Metode Kualitatif sendiri memiliki berbagai definisi, namun menurut John Creswell metode ini merupakan pendekatan penelitian yang bersinggungan dengan aspek sosial kemanusiaan. Dalam mengaplikasikannya, terdapat proses memahami keterkaitan antara manusia dengan konteks sosial, budaya, hingga politik yang membantu mengeksplorasi permasalahan tersebut.<sup>34</sup> Metode ini menghasilkan data deskriptif, menjadikan penelitian sebagai alat untuk mengumpulkan informasi dan menjabarkan gejala yang ada di lapangan.

### **I.5.2 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian akan didasari dan diperkaya dengan pengolahan informasi baik dari data primer maupun sekunder. Teknik studi kepustakaan dan penalaran deduktif akan dipergunakan untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca secara kritis untuk memilih, menimbang, mengomentari, dan menyusun kembali argumen dari bahan bacaan, serta menarik kesimpulan berdasarkan prinsip, hukum, dan teori yang berlaku umum bagi suatu gejala. Laporan resmi kegiatan *UN Women*; dokumen resmi Pemerintah Australia yang diperoleh melalui situs resmi; pemberitaan yang dirilis *UN Women Pacific*

---

<sup>34</sup> Creswell, J. W., “*Qualitative Inquiry and Research Design*”, (California: Sage Publication Inc., 1998), hal. 36-37

melalui situs *Facebook*; dokumentasi dari instansi terkait; situs internet lain yang relevan dengan topik; serta artikel, jurnal, buku, dan makalah yang sesuai dengan materi pembahasan menjadi sumber pustaka dalam penelitian ini.

Dalam rangka memperoleh data primer, teknik wawancara dipergunakan kepada sejumlah ahli, yakni staf *UN Women Fiji Multi Country-Office* dengan *Regional Project Associate of Ending Violence against Women*, Taina Williams. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan tiga orang representasi dari organisasi non-pemerintah di Pasifik yang menjadi penerima hibah *Pacific Fund*. Ketiga orang tersebut meliputi *Programs and Training Officer* Vois Blong Mere Solomon, Lisa Horiwapu; Direktur *Talitha Project Incorporation*, Vanessa Heleta; dan Presiden Ma'a Fafine mo e Famili Tonga, Betty Hafoka-Blake.

Teknik wawancara tersebut dilakukan melalui surat elektronik. Pertanyaan wawancara secara umum menanyakan perihal pelaksanaan program-program yang berjalan sebagai rangkaian dari program unggulan '*Policy to Action*' di bawah pendanaan *Pacific Fund*. Selain itu, data juga diperoleh dengan menganalisis data-data yang dirilis resmi oleh *UN Women* maupun Pemerintah Australia.

## **I.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Penelitian ini akan terbagi dalam lima bab yang saling memiliki keterkaitan, keterpaduan, dan kesinambungan. Penjabaran mengenai Pendahuluan akan dibahas dalam Bab I lewat beberapa sub-bab, yakni; Latar Belakang Masalah; Identifikasi Masalah, yang terbagi atas Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Studi Pustaka dan Kerangka Pemikiran; Metode dan

Teknik Penelitian, yang terbagi atas Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data; serta Sistematika Pembahasan.

Bab II kemudian membahas mengenai ketidaksetaraan gender yang terjadi di sejumlah negara Pasifik, yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai *UN Women* dan implementasi kerjanya dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dalam Bab III. Adapun dalam Bab IV yang akan membahas korelasi antara pembahasan yang dipaparkan dalam Bab II dan Bab III, berisi analisis penelitian dengan memaparkan bagaimana Diplomasi Multi-Jalur diimplementasikan oleh kesembilan kalangan untuk merespons isu kekerasan terhadap perempuan, baik melalui kebijakan dan rencana strategis pemerintah, maupun melalui kerja sama dengan organisasi internasional. Penelitian ini akan ditutup dengan Bab V yang berisi kesimpulan, mencakup pokok-pokok utama penelitian secara komprehensif.